

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan target antara dan uraian pilar.
- (3) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Daerah.
- (4) Target antara, uraian pilar, dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 57 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 GUNUNGKIDUL NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Agama, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	imunisasi dasar lengkap.			Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 490.000 jiwa Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 54.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon,

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
				Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 90.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase Kalurahan / kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Pemangku Kepentingan.

B. URAIAN PILAR

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembuk stunting tingkat Kapanewon	Target: minimal 2 (dua) kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan /peraturan bupati tentang kewenangan Kalurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Peraturan Bupati Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan Kalurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah Kalurahan/ kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
			Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepentingan.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan.	1. Jumlah pemerintah Kalurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% seluruh Kalurahan Tahun: 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	4. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: 100% semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kapanewon dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kalurahan / kelurahan yang kader pembangunannya manusia-manusia mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Kabupaten, dari Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Panewu, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
				Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Panewu, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Panewu, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Jumlah kapanewon yang memiliki minimal 2 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kapanewon Tahun: 2024	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Kalurahan/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	pelatihan			
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun 2024	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kalurahan/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Panewu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat	Target: 90%	Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Tahun: 2024	Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Panewu, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kantor Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi	1. Kabupaten Gunungkidul telah mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Target: 100% Tahun: 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
gizi di tingkat Kabupaten dan Kapanewon	daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2. Persentase Kapanewon yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Kalurahan /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kalurahan/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja	Target: 100% Tahun: 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	Kalurahan dan Rencana Kerja dan Anggaran Kalurahan).			
	4. Persentase Kalurahan/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana Kalurahan/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kalurahan/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 80% Tahun: 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Kalurahan/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	(KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.			
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	14. Kabupaten Gunungkidul telah mengintervensi	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .		Kesehatan Hewan dan Dinas Kelautan Perikanan	Perikanan, Kapanewon dan Pemangku Kepentingan.
	15.Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil	Target: 1	Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Tahun Setiap 6 bulan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age Specific fertility rate /ASFR</i>) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kapanewon, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat	Target: 50% Tahun 2024	Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan	Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi		Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perikanan, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kapanewon, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)			
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Pertanian Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Kabupaten Gunungkidul memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Kalurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten Gunungkidul	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kapanewon dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Bappeda DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
			KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dan Keluarga Berencana, Dinas PUPR, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kapanewon dan Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Kalurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemerintah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kapanewon dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
			Kalurahan	
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
8. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kapanewon, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 sistem Tahun: 2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kesehatan, , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Kapanewon
	4. Persentase	Target: 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kapanewon, dan

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	Kapanewon yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Tahun 2024		Pemangku Kepentingan.
9. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Kabupaten Gunungkidul telah menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
10. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya sistem penghargaan bagi kalurahan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	2. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Badan Keuangan Aset Daerah dan Badan	Badan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas

KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>		Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

C. RENCANA AKSI DAERAH

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
1	Penyediaan Data Basis terpadu Keluarga Berisiko Stunting	Pendataan dan penapisan keluarga berisiko stunting yang termutakhirkan	Pendataan keluarga berisiko stunting (1)	Keluarga berisiko stunting	Tersedianya data jumlah keluarga (PUS) berisiko stunting (1)	Data		1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
			Pendataan Catin/ Calon PUS 3 (tiga)	Catin/ CaPUS	Tersedianya data Catin/ CaPUS 3 (tiga)	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
			bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/ Calon PUS dengan Pemeriksaan kesehatan (2)		bulan sebelum menikah (2)							Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	
					a. Tersedianya data Catin/CaPUS yang terdeteksi anemia	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					b. Tersedianya data status gizi Catin/ CaPUS (kurus <18,4 /normal 18,5 - 25 /	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					gemuk > 25)							Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	
			Pendataan ibu hamil (3)	Ibu hamil	Tersedianya data ibu hamil (3)	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					a. Tersedianya data ibu hamil dengan anemia	Data		-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					b. Tersedianya data ibu hamil KEK	Data		-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					c. Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat	Data		-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					(PJT)								
			Pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa Interval yang termutakhirkan (4)	Ibu pasca persalinan	Tersedianya data ibu yang belum menggunakan KB Pascapersalinan (4)	Data		-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB (5)	PUS 15-49 tahun	Tersedianya data PUS IAT/ TIAL yang belum ber KB (5)	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
			Pendataan dan penapisan anak usia 0-23 bulan (6)	Anak usia 0-23 bulan	Tersedianya data anak usia 0-23 bulan (6)	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					a. Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan < 2500 gram	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					b. Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan < 48 cm			1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					c. Tersedianya data anak 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif	Data		1	1	1	1		
					d. Tersedianya data anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI	Data		1	1	1	1		
					e. Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan diare kronis	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					f. Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan gizi kurang	Data		1	1	1	1		
					g. Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi	persen						Dinas Kesehatan	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					buruk								
					h. Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					i. Tersedianya data anak 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					j. Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan (7)	Anak usia 24-59 bulan	Tersedianya data anak usia 24-59 bulan (7)	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					a. Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan diare kronis	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					b. Tersedianya data anak usia 24-59 bulan	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					dengan gizi kurang								
					c. Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					d. Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
					e. Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	Data		1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
		Pendataan dan penapisan	Pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima	Keluarga prasejahtera	Tersedianya data keluarga prasejahtera	Data		-	1	1	1	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
		keluarga prasejahtera	program bantuan sosial (8)		penerima program bantuan sosial (8)							Dinas Sosial	
					a. Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM)	Data		-	1	1	1	Dinas Sosial, Dinas	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur							Kesehatan	
					b. Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Data		-	1	1	1	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
					c. Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan non-tunai	Data		-	1	1	1	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
					d. Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Data		-	1	1	1	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
		Pendataan dan penapisan keluarga	Pendataan memiliki remaja,	Keluarga memiliki remaja,	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan	Data		-	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
		memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia	dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak (9)	dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang	ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum mengakses air minum layak (9)							Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		0-23 bulan terhadap fasilitas lingkungan sehat		memiliki anak usia 0-23 bulan									
			Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki sarana rumah sehat (10)	Data		-	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
			sehat (10)	bulan									
			Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat (11)	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Tersedianya Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki jamban sehat (11)	Data		-	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
			Pendataan Kalurahan prioritas stunting (12)	Kalurahan	Tersedianya data Kalurahan prioritas stunting (12)	Data		-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Kesehatan	
	Pendampingan	Pembentukan tim pendamping	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Kalurahan/kelurahan (1)	Kalurahan/kelurahan	Persentase Kalurahan/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK (1)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
		Peningkatan kapasitas Tim pendamping keluarga	Orientasi manajemen dan substansi stunting bagi TPK (2)	TPK	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi (2)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
		KIE Stunting melalui komunikasi kelompok dan interpersonal	KIE kelompok keluarga berisiko stunting (3)	Kalurahan/kelurahan	Persentase Kalurahan/kelurahan yang TPK-nya melakukan KIE kelompok minimal 1	Persen			80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					kali per bulan (3)							n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko stunting (4)	Keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standard (4)	Persen		-	30	40	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
		Pelayanan dan Rujukan Remaja Putri	Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri	Remaja Putri	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen						Dinas Kesehatan	
		Pelayanan dan Rujukan catin/ CaPUS	Pendampingan Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah (5)	Catin/ CaPUS	Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah (5)	Persen		-	70	80	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Berencana dan Dinas Kesehatan	
				Catin/ CaPUS Anemia	a. Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen		-	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Catin/ CaPUS dengan status gizi (kurus/ gemuk)	b. Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Persen		-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
		Pelayanan dan rujukan ibu hamil	Pendampingan Ibu Hamil (6)	Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan (6)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan	
					a. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan	Persen		-	70	75	80	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Ibu hamil KEK	b. Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi	Persen		-	75	85	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)	c. Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan	Persen		-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
		Pelayanan dan rujukan Ibu Pascapersalinan	Pendampingan ibu pasca persalinan (7)	PUS pasca persalinan	Persentase KB Pasca persalinan (7)	Persen		27	50	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Dan Keluarga Berencana	
		Pelayanan dan rujukan PUS masa Interval	Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL) (8)	PUS	Persentase penurunan Unmet need (8)	Persen		8,3	8	7,7	7,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
		Pelayanan dan rujukan anak usia 0-23 bulan	Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan (9)	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan (9)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat	a. Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan	Persen		-	80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan,	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan	
				badan <2500 gram	dengan berat badan <2500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi								
				Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	b. Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Persen		-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
					c. Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen		50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Keluarga dengan anak	d. Persentase keluarga dengan	Persen		50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
				usia 6 – 23 bulan	anak 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI								
				Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	e. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen		93,6	94,1	94,6	95	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis	f. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Persen		50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang	g. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen			70	80	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				Keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	h. Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan	Persen			70	80	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					tata laksana gizi buruk								
		Pelayanan dan Rujukan anak usia 24-59 bulan	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis (10)	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan (10)	Persen		50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang (11)	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi kurang	a. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen		-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk (12)	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk	b. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	Persen		-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
		Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko stunting terhadap bantuan sosial	Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko stunting terhadap bantuan sosial (13)	Keluarga prasejahtera beresiko stunting	Cakupan keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima bantuan sosial (11)	Persen		-	80	85	90	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
					a. Cakupan keluarga	Persen		-	80	85	90	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur								
					b. Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersarat	Persen		-	80	85	90	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
					c. Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai	Persen		-	80	85	90	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
					d. Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen		-	80	85	90	Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
		Fasilitasi akses keluarga berisiko stunting terhadap lingkungan sehat	Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko stunting (14)	Keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak (12)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pemberdayaan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Baseline Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												an Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting (15)	Keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni (13)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Intervensi Sensitif
			Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting (16)	Keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat (14)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Dan Keluarga Berencana	
		Fasilitasi Peningkatan ketahanan pangan keluarga berisiko stunting	Dapur Gizi Keluarga di Kalurahan prioritas stunting berbasis pangan lokal (17)	Kalurahan	Persentase Kalurahan prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal (15)	Persen		-	50	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Spesifik
	Audit Kasus Stunting	Audit kasus Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Terbentuknya tim audit kasus stunting di kab/kota (1)	Kab/kota	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit stunting (1)	Persen		-	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
			Pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga (2)	Kab/kota	Persentase pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun (2)	Persen		-	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												Keluarga Berencana	
			Diseminasi hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga (3)	Kab/kota	Persentase diseminasi hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun (3)	Persen		-	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
			Tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga (4)	Kab/kota	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun (4)	Persen		-	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif
3	Perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas	Koordinasi perencanaan dan penganggaran	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten/kota (1)	Pemerintah kab/ kota	Persentase kab/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun	Persen		-	80	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	Intervensi Koordinatif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
					sebelumnya (1)							Berencana	
					a. Persentase kab/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Persen		-	80	100	100	Bappeda	Intervensi Koordinatif
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat Kalurahan (2)	Pemerintah Kalurahan	Persentase Kalurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya (2)	Persen		-	80	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Intervensi Koordinatif
4	Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan	Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan	Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas	Persen		-	100	100	100	Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
	Penurunan <i>Stunting</i>	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	penyelenggaraa n kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (3)		perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (3)							Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Pengelolaan Pusat Pengendali Data Stunting Nasional	Pengembangan standar data (4)	Kementerian / Lembaga	Tersedianya standar data (4)	Dokumen		-	1	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Intervensi Sensitif
			Pengembangan meta data (5)	Kementerian / Lembaga	Tersedianya meta data (5)	Dokumen		-	1	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Intervensi Sensitif
			Pengembangan SOP mekanisme sharing data (6)	Kementerian / Lembaga	Terintegrasinya data stunting (6)	Dokumen		-	1	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberda	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
												yaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas kesehatan	
			Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data Stunting Nasional (7)	Tim Pusat Pengendali Data	Terlaksananya sistem pengelolaan data keluarga berisiko stunting (7)	Sistem		-	1	1	1		Intervensi Sensitif
			Survailans keluarga berisiko stunting yang termutakhirkan (8)	Keluarga berisiko stunting dan balita stunting	Tersedianya data keluarga berisiko stunting dan balita stunting yang termutakhirkan (8)	Data		-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			Forum satu data PASTI (9)	Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah	Terlaksananya forum satu data PASTI dua kali dalam 1 tahun (9)	Kegiatan		-	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberda	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	Base Line Data	TARGET				OPD Pengampu	KETERANGAN
								2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
			Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (10)		Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (10)								
			Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (11)	Kalurahan	Persentase Kalurahan kelurahan yang berkinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (11)	Persen		-	80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Intervensi Sensitif

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

